

1985: Tahun Penghapusan Becak?

Oleh Franz Magnis-Suseno

KITA telah memasuki tahun 1985. Tahun baru ini mempunyai makna yang istimewa: 40 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan 20 tahun sejak penyelamatan Pancasila terhadap rongrongan G30S/PKI.

Banyak sekali peristiwa yang dapat kita banggakan. Saya ingin menyebutkan empat prestasi utama, sementara banyak negara lain di Asia belum berhasil.

Pertama, keutuhan nasional. Bahwa 3.000 pulau berpegang dengan lebih dari 200 bahasa dan dengan berbagai kelompok agama dan kepercayaan dapat bersatu dengan mantap dalam wadah satu Republik Indonesia berdasarkan satu ideologi negara yang diterima umum, bahwa tidak ada gerakan-gerakan separatis yang berarti (Irian Jaya dan Timor Timur merupakan kasus khusus), bahwa Indonesia mempunyai suatu administrasi negara yang efektif di seluruh pelosok tanah air, sebenarnya merupakan prestasi luar biasa.

Kedua, kenyataan bahwa negara yang majemuk dan sentrifugal ini tidak tenggelam dalam chaos total, melainkan berhasil meletakkan suatu kerangka landasan pembangunan ekonomis yang dapat diandalkan, bahwa malapetaka-malapetaka kelaparan luas dapat dicegah, bahwa kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya terjamin, merupakan jasa historis Orde Baru yang dimensinya baru kita sadari apabila kita membandingkan Indonesia dengan sekian banyak negara lain.

Ketiga, Indonesia berhasil menjaga perdamaian dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara tetangga.

Prestasi keempat ialah, bahwa sejak penumpasan PKI gejala-gejala sosial besar dalam masyarakat Indonesia dapat dicegah.

Ancaman kekerasan

Akan tetapi, ada satu gejala yang mencemaskan pada akhir tahun 1984, yaitu sikap kekerasan yang semakin memuncak dalam masyarakat.

Di mana-mana kekerasan mengancam. Koran-koran kita penuh dengan berita tentang perkelahian, pembunuhan yang tak perlu (di mana tujuan kejahatan sebetulnya tidak memerlukan pembunuhan, tetapi korban dibunuh juga) atau karena alasan yang sepele saja. Sekedar senggol-menyenggol antara dua kendaraan, biasanya sudah menimbulkan reaksi keras.

Atau kita mengamati sebuah sedan mercedes yang mau masuk ke jalan kecil: di mulut jalan kecil diparkir sebuah gerobak air. Apakah pemilik gerobak akan mengundurkan gerobaknya 20 sentimeter agar mercedes dapat masuk? Tidak! Dengan muka yang keras dan mata yang mengancam ia mengawasi usaha susah payah sopir mercedes agar bisa

lewat. Awas kalau sampai gerobak itu keserempet!

Makna kejadian sehari-hari itu jelas: inilah saat orang kecil menikmati kekuasaan terhadap mereka dari dunia golongan atas. Peristiwa kekerasan di Tanjungpriok pun yang sepintas kelihatan berlatar belakang keagamaan, menurut penjelasan pemerintah erat hubungan dengan keadaan sosial kampung-kampung bersangkutan yang buruk. Potensial kekerasan sudah tersedia, hasutan kecil saja dapat menyalakannya.

Implikasi kekerasan

Kecepatan timbulnya reaksi keras itulah yang menakutkan. Di belakangnya kita merasakan campuran perasaan frustrasi, kebencian, ketakutan, suasana penolakan. Maka orang kembali mencari keamanannya dan identitasnya dalam lingkungan primordial. Di luar lingkungan itu ia merasa terancam dan oleh karena itu bersikap keras. *Homo homini lupus* (manusia sebagai serigala terhadap manusia), kata Thomas Hobbes.

Suasana kebencian, frustrasi dan penolakan dapat mengancam pembangunan. Karena bagi orang yang sudah bersikap negatif, usaha pemerintah yang terbaik pun tidak akan berkenan di hati. Pembangunan berhasil, artinya ia semakin berhasil mencairkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat demi usaha untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, akseptasi sosial merupakan unsur kunci dalam keberhasilan pembangunan.

Alangkah tragisnya kalau hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai menjadi kurang operasional karena suasana sebagian masyarakat yang tidak dapat menghargainya. Demi kemulusan kesinambungan dwidasawarsa yang ketiga dengan yang kedua perlu dihilangkan hambatan-hambatan bagi akseptasi sosial hasil-hasil yang telah tercapai. Tak cukuplah, pembangunan mencapai sasaran, nya secara obyektif, hati masyarakat pun perlu direbut.

Perasaan masyarakat

Mengapa dalam masyarakat terdapat perasaan-perasaan negatif padahal hasil-hasil pembangunan kelihatan di mana-mana? Sudah pasti ada pihak-pihak yang memang *a priori* melawan pemerintah, yang selalu akan menghasut. Tetapi hasutan itu hanya akan "makan" apabila dalam masyarakat sendiri sudah ada perasaan-perasaan yang pahit. Maka yang harus dipertanyakan adalah asal-usul perasaan pahit itu.

Berikut ini saya ingin mengajukan pendapat, bahwa dalam perlakuan terhadap masyarakat ada sesuatu yang kurang beres, yang

mudah dapat menimbulkan perasaan pahit atau terhina dalam hati orang sederhana, dan karena perasaan itu orang lantas mengambil sikap menolak yang *a priori*.

Beberapa contoh: sejak bulan Desember bajaj dilarang lewat di Jl. Kramat Raya dan Salemba Raya Jakarta Pusat. Larangan ini tidak hanya membuat marah para pengemudi bajaj, melainkan juga masyarakat menengah dan kecil yang setiap hari mempergunakan angkutan yang lincah dan murah ini, yang merasa kehidupannya diperberat. Sekaligus masyarakat tahu betul bahwa mereka yang tanpa konsultasi apa pun dengan masyarakat telah mengambil keputusan itu, tak pernah perlu memaknai kendaraan umum. Larangan ini mesti menyakiti hati masyarakat yang bersangkutan.

Atau ambil keputusan untuk tidak memberikan izin pengoperasian becak lagi di DKI Jakarta mulai bulan April yang akan datang. Keputusan ini berarti, bahwa menarik becak menjadi tindakan gelap; dengan sendirinya para tukang becak akan menjadi korban segala macam tindakan pihak berwajib, baik resmi maupun tidak resmi. Puluhan ribu orang akan menderita, begitu pula ratusan ribu penghuni kampung, yaitu mereka semua yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Menggantikan becak sebagai kendaraan lincah, bersih, bebas polusi dan tidak bising di kampung-kampung dengan bemo atau kendaraan bermotor lain 'kan omongan orang yang tidak perlu memaknai becak sendiri!

Yang merisaukan bukan keputusan itu sendiri. Kita semua tahu bahwa masalahnya cukup kompleks. Melainkan kesan masyarakat bahwa keputusan itu secara sepihak menguntungkan golongan pemilik mobil, mereka yang sudah hidup dengan baik, sedangkan kepentingan orang kecil yang langsung terkena akibat tindakan itu dianggap sepi. Keputusan ini makanan bagi apa yang disebut kecemburuan sosial.

Perlakuan semacam ini setiap hari dapat dialami orang kecil: waktu berjejalan bersama dalam bis yang penuh sesak, yang harus merangkak di jalur lambat, sedangkan di jalur cepat sedan-sedan meluncur dengan sekenanya. Perlakuan oleh birokrasi yang melayani masyarakat dengan sombong dan rakus, dengan mengulur-ulur penyelesaian surat-surat penting.

Atau bagaimana perasaan guru SD kalau gajinya yang sudah tidak mencukupi masih ditunda pembayarannya berbulan-bulan lamanya (Mengapa belum pernah kedengaran bahwa seorang pemimpin departemen menolak menerima gaji dan tunjangan sendiri

during pegawainya yang paling rendah belum menerima gajinya)? Atau masih dikenakan potongan tanpa diminta persetujuannya?

Atau ambil kebiasaan untuk membiarkan calon pegawai negeri dan swasta bertahun-tahun lamanya dalam status tenaga harian sehingga ia tidak mempunyai hak apa-apa. Penggusuran permukiman rakyat walaupun dasar hukumnya belum dipastikan. Pemaksaan pelbagai kebijaksanaan dengan cara komando kepada petani. Dan bagaimana halnya ucapan rutin sementara pejabat berhadapan dengan suatu masalah, bahwa yang bersangkutan "akan ditransmigrasikan", seakan-akan orang-orang itu sekawan sapi yang sewaktu-waktu dapat diangkut ke mana saja.

Dampak pengalaman-pengalaman semacam itu pada perasaan masyarakat lebih besar lagi karena pada waktu yang sama sempat menyaksikan suatu dunia lain yang tertutup bagi mereka, dunia orang mewah: orang-orang dengan pakaian mewah, berkendaraan mewah, di rumah-rumah mewah, yang *shopping* dalam istana-istana penjualan yang sangat mewah (yang kadang-kadang dibangun di atas tanah bekas lokasi perkampungan), yang keluar-masuk hotel yang mewah, yang menikmati malam tahun baru yang seharga gaji sebulan orang biasa. Apakah mengherankan bahwa dalam kontras-kontras itu perasaan solidaritas sosial melayu, dan diganti dengan perasaan iri hati dan penolakan?

Barangkali masyarakat terlalu banyak mengalami perlakuan semacam itu. Padahal pengalaman itu mudah menyentuh perasaan martabat mereka sebagai manusia dan warga negara. Karena itu mereka bersikap negatif. Sampai perbaikan-perbaikan dalam tingkat kehidupan mereka sendiri berkat usaha pembangunan tidak mau diakui. Dengan demikian perlakuan yang dapat menimbulkan perasaan itu dalam hati masyarakat akan mengganggu usaha pemerintah agar pembangunan "benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan hidup, yang berkeadilan sosial". Manusia itu makhluk yang halus perasaannya. Ia akan mengakui segala perbaikan apabila martabatnya juga terasa dihormati.

Mengambil tindakan

Sudah hampir dua puluh tahun lamanya Pemerintah Orde Baru memimpin rakyat dalam membangun suatu kehidupan yang menunjang manusia Indonesia dalam keutuhannya. Apakah tidak perlu diambil tindakan pencegahan terhadap sikap-sikap yang dapat menyebabkan bahwa hasil-hasil pembangunan yang seharusnya dibanggakan sampai kurang diakui oleh sebagian masyarakat? Barangkali usaha untuk mem-

nangkan hati masyarakat perlu mendapat prioritas utama.

Dalam koran ini beberapa tokoh politisi dan ilmuwan mengemukakan gagasan, bahwa sudah tiba saatnya diadakannya pengendalian sosial. Rasanya memang demikian. Bukankah asas kekeluargaan menuntut agar semua golongan tahu diri?

Tindakan ini perlu ke dua arah. Di satu pihak golongan yang memamerkan gaya hidup yang sudah lepas dari landasan kesetiakawanan sosial perlu dikendalikan. Gaya konsumsi yang jauh di luar jangkauan masyarakat dan asing terhadap nilai-nilai budaya nasional, perlu ditindak, dan dana-dana yang memungkinkannya dialihkan ke pembangunan nasional. Di lain pihak sikap, tindakan dan keputusan yang membuat orang-orang kecil merasa diobyeikkan, diancam dan dihina perlu dihentikan. Demikian agar kita semua dalam dwidasawarsa yang ketiga dapat menikmati hasil pembangunan yang sudah berjalan sejak 16 tahun dan perlu diteruskan dengan sekuat tenaga.

1985, tahun penghapusan becak di Jakarta? Ah jangan dong, harganya terlalu mahal!***

* *Franz Magnis-Suseno SJ*, dosen Sekolah Tinggi Filsafat "Driyarkara", Jakarta.